

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, manusia sebagai makhluk individu memiliki ciri khas, kepribadian, karakter yang berbeda dengan satu dan lain nya. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, dimana tentu manusia membutuhkan satu sama lain dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat (wayan, 2016). Setiap manusia terlahir dengan memiliki hak dan kewajiban yang sama, hak asasi manusia adalah dasar yang secara kodrat nya melekat pada diri manusia, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh terabaikan, dirampas oleh siapa saja.(Subardhini, Hartini & Luhpuri, 2020)

Pada penelitian kinasih (2010) dan Perwitasari (2012) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai tingkat kesejahteraan hidup yang rendah. Rendahnya kesejahteraan itu antara lain karena mereka memiliki keterbatasan fungsi pada fisik, mereka merasa tidak berharga dan sering memiliki pengalaman emosi negatif karena keterbatasan fisiknya. Hal ini berdampak negative untuk penyandang disabilitas seperti kehilangan peran, kemandirian, status dan stabilitas keuangan nya.

Dalam Undang-Undang No.8 tahun 2016 menyatakan tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah menjamin adanya kesempatan yang sama untuk difabel pada semua aspek kehidupan, termasuk hak mendapatkan pelayanan yang layak

pada semua aspek. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, hal ini berlaku pula bagi kelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan fisik dan kelalaian intelektual, yang tidak bisa berfungsi secara normal atau yang bisa disebut penyandang disabilitas.

Data ILO tahun 2013 menunjukkan bahwa sekitar 82% penyandang disabilitas berada dalam negara berkembang dan kehidupan mereka dibawah garis kemiskinan dan seringkali dihadapi keterbatasan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan Pekerjaan yang layak (organization & international, 2013).

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 menunjukkan dari kelompok yang berumur 2-6 tahun berjumlah 33.320.357 jiwa dengan penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.150.173 jiwa sedangkan penyandang disabilitas berat 309.784 jiwa. Kelompok umur 7-18 tahun berjumlah 55.708.205 jiwa terbagi atas penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.327.688 jiwa sedangkan penyandang disabilitas berat berjumlah 433.297 jiwa. Kelompok umur 19-59 tahun sebanyak 150.704.645 jiwa yang terbagi penyandang disabilitas berat sebanyak 2.627.531 jiwa. Kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 24.493.684 jiwa dengan rincian nya yaitu penyandang disabilitas sedang sebanyak 12.073.572 jiwa sedangkan penyandang disabilitas berat nya sebanyak 3.381.134 jiwa.

Para penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik dan mental yang mempunyai perbedaan jika dibandingkan dengan orang normal pada umum nya, sehingga diharuskan mendapatkan suatu pendampingan ataupun

pemberdayaan untuk mengembalikan keberfungsian dan juga kemandirian bagi penyandang disabilitas. Permasalahan penyandang disabilitas muncul karena adanya gangguan fisik, sehingga menghambat mereka untuk melakukan aktivitas disegala bidang.

Potensi risiko yang dialami disabilitas itu antara lain adanya konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah maupun potensi bencana alam yang dapat terjadi seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan sebagainya yang bisa memicu terjadinya disabilitas fisik (Sukatoni, 2011) dalam (Indrakentjana, 2019).

Dari data terbaru yang didapatkan dari laman sistem informasi kementerian sosial, dari banyak nya provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menempati provinsi terbanyak populasi yang masyarakat nya menyandang disabilitas. Jawa Barat menempati pertama dengan 22.689 jiwa penyandang disabilitas, kedua terdapat Jawa Timur dengan 22.349 jiwa penyandang dan ketiga adalah Jawa Tengah dengan angka 17.699 jiwa penyandang disabilitas. Dilihat dari data tersebut, bahwasanya Jawa Barat provinsi yang harus diperhatikan untuk para penyandang disabilitas, terutama pemerintah kota dan provinsi yang memberikan pelayanan, aksesibilitas, ketersediaan dan juga pemenuhan hak-hak dari disabilitas yang membutuhkan.

Kota Bogor, dari laman berita (www.Suara.com) menuju kota ramah untuk penyandang disabilitas, maka Pemerintah Daerah membuat peraturan daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang diperuntukkan mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016

tentang Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, selain untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah hadir agar tidak abai pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Tujuannya ini untuk mewujudkan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Selain itu pemerintah ingin mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, lahir batin, mandiri, serta bermartabat. Selain itu untuk melindungi penyandang disabilitas dari eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif juga pelanggaran hak asasi manusia.

Penanganan penyandang disabilitas dilakukan dengan melakukan rehabilitasi, namun untuk melakukan rehabilitasi di panti, itu tidak memungkinkan untuk menjangkau semua kliennya, maka pemerintah memberdayakan potensi masyarakat untuk menjadi seorang pekerja sosial masyarakat dan bantuan pekerja sosial profesional. (Mardiyati, 2017)

Seorang pekerja sosial masyarakat dan pekerja sosial profesional merupakan profesi dan relawan sebagai pendamping yang memiliki peran untuk mendampingi para penyandang masalah sosial. Pendamping sosial untuk masyarakat adalah pekerja sosial masyarakat, pekerja sosial profesional. Mereka adalah orang yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi dalam Pekerjaan sosial untuk memiliki kompetensi dalam dunia Pekerjaan sosial yang didapatkan dari pendidikan atau pelatihan. (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009)

Pendamping sosial untuk disabilitas dari pekerja sosial masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab yang kompleks dari bentuk pertolongan sampai perubahan. Pendamping memiliki tanggung jawab untuk pertolongan, kasih sayang dan perubahan. Peran pendamping dibutuhkan untuk memotivasi dan membantu mendapatkan akses sumber-sumber, melakukan interaksi sosial sampai mencapai kemandirian lagi. (Mardiyati, 2017b)

Kementerian sosial menaruh harap kepada para pendamping sosial untuk penyandang disabilitas, agar bisa membantu para penyandang disabilitas untuk lebih mandiri lagi, seperti yang diberitakan dalam laman (<https://kumparan.com/>) dimana setiap pendamping sosial diberikan *workshop* untuk mendapatkan pemahaman agar para disabilitas bisa mandiri terutama disabilitas intelektual.

Hak-hak penyandang disabilitas juga sudah ditegaskan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya “Setiap warga negara yang berusia lanjut cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Para penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik dan mental yang juga memiliki perbedaan secara karakter dibandingkan orang normal pada umumnya, jadi harus mendapatkan pelayanan yang lebih.

Adapun dari penelitian (Mardiyati, 2017) menyatakan Pendamping yang menjadi ujung tombak dalam layanan bagi penyandang disabilitas dari tingkat bawah di wilayah perdesaan. Peran pendamping menjalankan tugas berbekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerelawanan serta kesabaran dalam melakukan pendampingan para penyandang untuk dapat mandiri dan berdaya bagi disabilitas ringan, dan menghubungkan atau memfasilitasi penyandang disabilitas berat dengan pihak pemerintah untuk mendapatkan layanan sesuai jenis kecacataannya.

Oleh karena itu penyandang disabilitas harus diberikan perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat terutama untuk melakukan upaya-upaya perlindungan, aksesibilitas, pemenuhan hak dan kebutuhan dan penanganan secara cepat kepada disabilitas fisik, untuk dilakukan rehabilitasi dan juga pemberian hak-hak yang dibutuhkan olehnya.

Dalam upaya untuk mengetahui seberapa pengaruh pelaksanaan pendampingan sosial oleh pekerja sosial masyarakat terhadap kemandirian penyandang disabilitas fisik, dipandang penting untuk dilakukan penelitian ini, karena dalam proses berjalannya pendampingan oleh pekerja sosial masyarakat terkadang para klien dalam prosesnya masih mendapatkan hambatan dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Sesuai dengan penelitian sebelumnya, pemerintah khususnya Dinas Sosial lebih baik mengganti atau menambah Pekerja Sosial Masyarakat apabila ada keluhan atau saran dari kelurahan untuk mencari pekerja sosial masyarakat yang baru yang bisa melakukan pendampingan dengan baik. (Yusti, 2020)

Oleh karena itu, dari pemaparan diatas yang sudah disampaikan, penelitian ini akan lebih berfokus pada penelitian seberapa pengaruh pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat terhadap kemandirian penyandang disabilitas fisik di Dinas Sosial Kota Bogor.

Penelitian ini sejalan dengan jenis-jenis penelitian yang dikemukakan oleh Friedlander dalam (Soehartono, 2015) salah satunya yaitu: “studi yang menguji memadai-tidaknya pelayanan sosial yang tersedia dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat” artinya pelaksanaan pendampingan diharapkan mampu memberikan pengaruh pada kemandirian penyandang disabilitas. Maka berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Pelaksanaan Pendampingan sosial pekerja sosial masyarakat (PSM) terhadap Kemandirian Orang dengan Disabilitas Fisik Di Dinas Sosial Kota Bogor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan dinilai yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan disabilitas fisik di Dinas Sosial Kota Bogor?
2. Bagaimana Upaya Kemandirian dari penyandang disabilitas fisik di Dinas Sosial Kota Bogor?
3. Apakah pelaksanaan pendampingan oleh pekerja sosial masyarakat berpengaruh terhadap kemandirian penyandang disabilitas fisik di Dinas Sosial Kota Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh pelaksanaan pendampingan sosial oleh pekerja sosial masyarakat terhadap kemandirian orang dengan disabilitas fisik di dinas kota Bogor
2. Untuk mengetahui seberapa pengaruh pelaksanaan pendampingan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat terhadap kemandirian orang dengan disabilitas fisik yang dilakukan Pekerja sosial.
3. Untuk mengetahui tercapai atau tidak nya Kemandirian setelah dilakukan pelaksanaan pendampingan oleh Pekerja sosial masyarakat.

Adapun Kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, yaitu:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan sumbangsih pada perkembangan keilmuan khususnya untuk pembahasan mengenai pelaksanaan pendampingan oleh pekerja sosial masyarakat terhadap kemandirian dengan disabilitas fisik di dinas sosial Kota Bogor.
 - b. Bisa menjadi bahan referensi untuk peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam tentang pengaruh pelaksanaan pendampingan sosial oleh pekerja sosial masyarakat terhadap Kemandirian orang dengan disabilitas fisik di dinas sosial Kota Bogor.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil uji seberapa berpengaruh pelaksanaan pendampingan sosial oleh pekerja sosial masyarakat terhadap kemandirian dengan disabilitas fisik di dinas sosial Kota Bogor.
2. Secara Praktis, yaitu:
 - a. Bagi Pemerintah Kota Bogor: hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan pada pelaksanaan dalam evaluasi program rehabilitas dan pelaksanaan pendampingan sosial oleh pekerja sosial masyarakat terhadap kemandirian penyandang disabilitas fisik di dinas sosial Kota Bogor.
 - b. Bagi Dinas sosial Kota Bogor: hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan juga wawasan untuk menambah anggota dan kinerja, khusus nya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pekerja Sosial masyarakat atau staf pembantu ketika melakukan intervensi pada bidang rehabilitasi di lapangan.
 - c. Bagi Mahasiswa: khususnya Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai penambahan wawasan keilmuan agar mengetahui seberapa pengaruh pelaksanaan pendampingan oleh pekerja sosial masyarakat masyarakat terhadap kemandirian orang dengan disabilitas fisik di dinas sosial Kota Bogor.

1.4. Kerangka Konseptual

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi yang menunjukkan keadaan seorang yang sejahtera, baik dari segi material maupun sosial yang memungkinkan

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial baik secara individu, keluarga maupun masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi dengan rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman secara lahir dan batin, yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya. Menurut Friedlander dalam Fachrudin (2018: 9) bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah:

Sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah bentuk lembaga yang memberikan pelayanan dan pertolongan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, kesehatan, standar kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kesejahteraan sangat berkaitan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan dalam pemenuhan hak-hak dari anak penyandang disabilitas fisik. dengan kesejahteraan ini dapat membantu memecahkan masalah sosial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik yang mana kesejahteraan sosial ini dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan nya setelah mendapatkan masalah yang dihadapinya. Masalah sosial adalah masalah yang biasa terjadi secara alamiah terjadi dilingkungan masyarakat. Masalah sosial terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Seperti yang terjadi pada lingkungan masyarakat, dimana terjadi banyak masalah sosial. Penyandang disabilitas fisik anak Termasuk kedalam masalah sosial dan membutuhkan bantuan untuk penanganan dari

permasalahannya. Dalam menangani permasalahan yang dialami oleh korban, perlu penanganan serius dengan mengandalkan lembaga pelayanan sosial juga masyarakat dalam memecahkan masalah sosial terjadi. Masalah sosial menurut Soekanto (2012:321) yang dikutip dari Gilin dan Gilin, yaitu:

Masalah sosial merupakan sesuatu yang ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau, menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial.

Definisi tersebut menjelaskan arti bahwa suatu kondisi yang dapat disebut sebagai masalah adalah ketika kondisi tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan atau nilai dan standar sosial yang ada di masyarakat. Masalah juga adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan masyarakat dimana diperlukannya suatu tindakan untuk menangani masalah tersebut agar dapat terjadi sebuah perubahan yang dapat merubah pada situasi atau kondisi yang menjadi lebih baik dan sesuai dengan norma sosial yang terdapat di masyarakat. Pelayanan sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial untuk tujuannya membantu masyarakat yang terdampak dan mengalami masalah sosial, tentu pelayanan sosial ini mampu menunjang dan mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat sehingga hadirnya pelayanan sosial yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan Kemandirian masyarakat itu sendiri agar lebih sejahtera secara penghidupannya. Definisi pelayanan sosial menurut Romanyslyn dalam Fachrudin (2018:51) menyatakan sebagai berikut:

Pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan dan meningkatkan Kemandirian individu-individu dan keluarga melalui (1) sumber-sumber sosial pendukung dan (2)

proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga-keluarga untuk mengatasi stress dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pelayanan sosial dapat dikategorikan secara sederhananya dengan paradigma bahwa pelayanan sosial harus lebih fokus menekankan pada Kemandirian baik individu, keluarga dan masyarakat tentunya pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat untuk menunjang kesejahteraan sosial didalam kehidupannya serta untuk mencegah terjadinya masalah sosial. Pelayanan yang diberikan untuk anak di lembaga dinas sosial adalah salah satunya pendampingan, terutama untuk anak penyandang disabilitas.

Pendampingan sosial menurut Departemen Sosial (2009) yaitu:

Suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Pendampingan sosial adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh seorang pendamping pekerja sosial profesional dari kementerian kepada anak penyandang disabilitas, namun pendamping tidak hanya dari seorang pekerja sosial profesional saja, tetapi relawan masyarakat yang diberikan pelatihan untuk menjadi seorang pendamping penyandang disabilitas, disebabkan balai tidak bisa menangani semua masalah para penyandang disabilitas, sehingga dihadapkannya pendamping sosial untuk mempermudah bila lembaga ingin melakukan intervensi namun tidak dibalai. Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni: pemungkinan (enabling) yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi individu

maupun komunitas berkembang secara optimal, penguatan (empowering) yaitu memberikan kekuatan dan perubahan dari yang sebelumnya lemah menjadi kuat untuk individu atau kelompok, perlindungan (protecting) yaitu upaya yang diberikan untuk melindungi anak-anak oleh seorang pekerja sosial dan pendukung (supporting) yaitu memberikan dorongan kepada klien agar bisa mengembalikan juga meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosialnya kembali. (Suharto, 2005: 95-97)

Adapun pendampingan biasanya dilakukan oleh seorang tenaga kerja dari profesi yang memiliki latar belakang keilmuan kesejahteraan sosial atau seorang pekerja sosial masyarakat yang disertifikasi oleh Kementerian Sosial. Pekerjaan sosial menurut Siporin dalam (Fachrudin, 2018:61) menyatakan pekerjaan sosial adalah: *“social work is defined as a social institutional method of helping people to prevent and to resolve their social problems, to restore and enhance their social functioning”*. Pekerjaan sosial dijelaskan sebagai bentuk lembaga sosial atau pekerjaan sosial merupakan profesi yang memiliki tujuan untuk membantu orang untuk memulihkan, mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, profesi pekerjaan sosial adalah profesi profesional yang memberikan kontribusi dalam perubahan sosial, untuk membantu klien dalam mengatasi, memecahkan masalah dan memberikan dukungan kepada klien yang membutuhkan bantuan dari pekerja sosial, tidak hanya membutuhkan seorang psikolog saja, namun pekerja sosial juga memiliki andil untuk membantu melakukan rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas fisik. Maka seorang pekerja sosial dapat meningkatkan Kemandirian dan kemandiriannya sehingga individu penyandang disabilitas dapat

berfungsi secara sosial nya dalam menghadapi kehidupan. Selain dari seorang lulusan sarjana sosial, pendampingan pun bisa dilakukan oleh seorang relawan masyarakat yang diangkat menjadi Pekerja sosial masyarakat (PSM).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Seorang pekerja sosial masyarakat memiliki tugas yaitu:

- a. Mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial
- b. Membantu mendorong, menggerakkan dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial.
- d. Mendampingi program kesejahteraan sosial di tingkat desa atau kelurahan.
- e. Berperan aktif dalam program nasional
- f. Sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pekerja sosial masyarakat membantu pemerintah dan pekerja sosial profesional untuk mengentaskan masalah sosial di Indonesia, terutama masalah pada penyandang disabilitas fisik. Yang mana seorang pekerja sosial masyarakat akan melakukan pendampingan, melakukan intervensi, reunifikasi atau sebagai

penyalur dan penghubung antara pemerintah dengan pelaksana kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas menurut (Dorang Luhpuri, 2019)

Disabilitas merupakan istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Disabilitas menurut asal kata terdiri dari *dis* dan *ability* yang mempunyai arti kemampuan, sehingga jika pengertian *dis* dan *ability* digabungkan, maka akan menjadi kebalikan dari kondisi mampu atau dalam kata lain berarti ketidakmampuan.

Menurut penjelasan diatas, memberikan penjelasan bahwa disabilitas adalah sebuah istilah yang diberikan untuk seseorang yang memiliki gangguan pada kemampuan fisik nya, dimana seseorang yang secara normal bisa melakukan berbagai aktivitas, namun seorang penyandang disabilitas tidak akan bisa melakukan nya, karena memiliki kondisi yang terbatas ketika hendak partisipasi dan tidak mampu untuk berfungsi sesuai dengan fungsi fisik nya. penyandang disabilitas juga memiliki berbagai macam jenis nya, namun di Kota Bogor terdapat penyandang disabilitas daksa/disabilitas fisik, termasuk yang terbanyak. Maka penelitian ini terfokus pada penyandang disabilitas fisik. Disabilitas fisik menurut Menurut Batckhurst dan Bedine (2008) dalam (Dorang Luhpuri, 2019) yaitu:

Penyandang disabilitas tubuh atau fisik adalah seseorang yang mengalami permasalahan pada fisik yang berakibat adanya hambatan bagi dirinya untuk melakukan aktivitas seperti berinteraksi secara normal dengan masyarakat sehingga memerlukan layanan dan program khusus.

Maksud dari penjelasan yang didefinisikan di atas bahwa penyandang disabilitas fisik adalah seseorang yang mengalami gangguan dan hambatan pada fisik nya sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, melakukan interaksi dengan normal dengan orang-orang disekitar sehingga diperlukan perhatian yang khusus seperti pelayanan agar mereka bisa melakukan aktivitas tersebut secara

normal dan bisa berfungsi kembali secara fisiknya. Kemandirian sangat erat kaitannya dengan disabilitas, seorang penyandang disabilitas diharapkan oleh semuanya bisa melakukan aktivitas seperti biasa paling tidak, kegiatan dasar agar mereka bisa mengurus hidupnya dengan mandiri tanpa bantuan orang lain dengan memberdayakan dirinya sendiri meskipun terbatas dengan fisik. Kemandirian menurut Barnadib dalam (Maryam, 2012) menjelaskan, “Kemandirian meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain”. Kemandirian berasal dari kata mandiri yang menurut (Poerwadarminta, 2007) mandiri adalah tidak tergantung pada orang lain, sedangkan kemandirian adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan orang lain.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis yang diajukan pada penelitian yang berjudul pengaruh pelaksanaan pendampingan sosial oleh pekerja sosial terhadap Kemandirian Penyandang disabilitas fisik di dinas sosial Kota Bogor adalah sebagai berikut:

(H₀) Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan pendampingan oleh pekerja sosial yang signifikan terhadap Kemandirian orang dengan penyandang disabilitas fisik di dinas sosial kota Bogor

(H1) Terdapat pengaruh pelaksanaan pendampingan oleh pekerja sosial masyarakat yang signifikan terhadap Kemandirian penyandang disabilitas fisik di dinas sosial kota Bogor

1.3.2 Sub-sub Hipotesis

1. H0: Tidak terdapat pengaruh pendampingan sosial terhadap Kemampuan inisiatif penyandang disabilitas fisik di dinas sosial kota Bogor.

H1: Terdapat pengaruh pendampingan sosial dalam terhadap Kemampuan inisiatif penyandang disabilitas fisik di dinas sosial kota Bogor.

2. H0: Tidak terdapat pengaruh pendampingan sosial terhadap penyandang disabilitas fisik mengatasi masalah dan hambatan di dinas sosial kota Bogor.

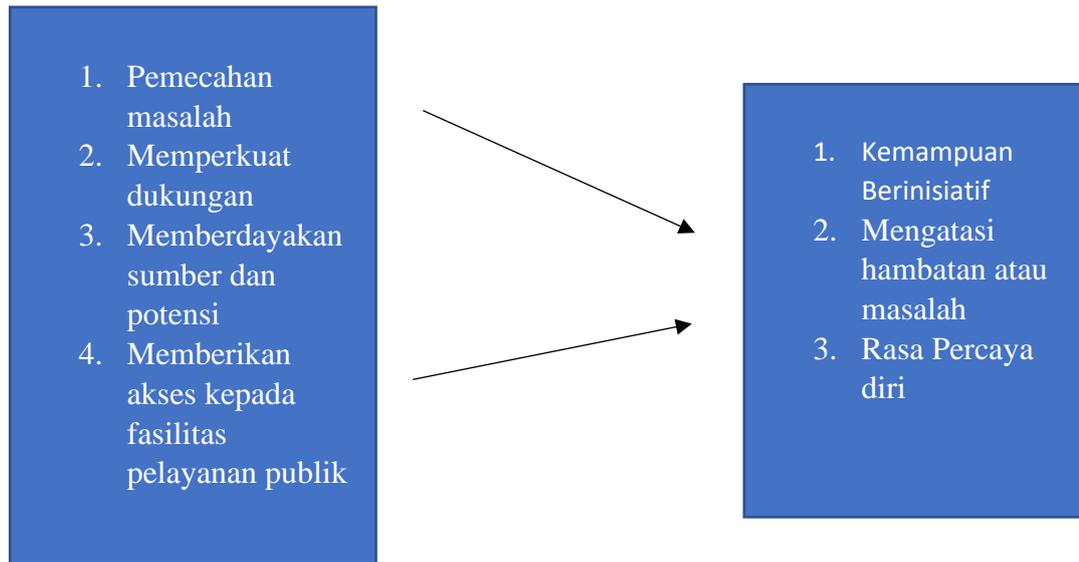
H1: Terdapat pengaruh pendampingan sosial dalam terhadap penyandang disabilitas fisik mengatasi masalah dan hambatan di Dinas sosial kota Bogor.

3. H0: Tidak terdapat pengaruh pendampingan sosial terhadap rasa percaya diri penyandang disabilitas fisik di dinas sosial kota Bogor.

H1: Terdapat pengaruh pendampingan sosial terhadap rasa percaya diri penyandang disabilitas fisik di Dinas sosial kota Bogor.

Pendampingan Sosial (x)

Kemandirian (y)



1.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian menurut (Soehartono, 2015) adalah menyatakan bagaimana operasi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang menunjukkan konsep yang dimaksud. Definisi inilah yang nanti dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian karena definisi menghubungkan konsep yang diteliti dengan gejala empirik nya.

Untuk mempermudah proses penelitian maka peneliti mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendampingan adalah dekat atau karib, ditambahkan imbuhan pen-an menjadi pendampingan yang memiliki arti proses, cara, perbuatan mendampingi atau menyampingkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2. Pendampingan sosial adalah proses menjalin relasi antara pendamping dengan klien yang memiliki tujuan memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan akses klien pada pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik dengan berpusat pada pelaksanaan empat tugas yaitu pemungkinan (enabling), penguatan (empowering), perlindungan (protecting) dan pendukung (supporting) untuk korban. (Departemen Sosial) (Suuharto, 2005)
3. Kemandirian adalah meliputi perilaku yang mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. (Watson & Lindgren, 1973)

1.1 Tabel Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Item Pernyataan/Pertanyaan
Variabel: Pendamping Sosial	1. Memecahkan masalah	1. Memahami masalah yang dihadapi 2. Mengetahui cara menyelesaikan masalah yang dihadapi	1. Mengetahui masalah klien 2. Mengidentifikasi masalah klien 3. Melakukan home visit 4. Memberikan bantuan kepada klien 5. Membantu memenuhi kebutuhan klien

	2. memperkuat dukungan	<p>1. memberikan dukungan emosional</p> <p>2. saran atau informasi</p> <p>3. dukungan instrumental</p>	<p>6. Memberikan motivasi kepada klien</p> <p>7. Menunjukkan simpati</p> <p>8. Memberikan dorongan</p> <p>9. Memberikan penawaran bantuan diri</p> <p>10. Memberikan informasi kebutuhan</p> <p>11. meringankan masalah</p> <p>12. mendapatkan kebutuhan</p>
	3. Memberdayakan akan sumber dan potensi	<p>1. memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan sumber</p> <p>2. memberikan kesempatan untuk berdayakan potensi</p>	<p>13. Memberikan akses bantuan klien</p> <p>14. Memberikan Kemudahan klien untuk perujukan</p> <p>15. mendapatkan donatur</p> <p>16. Menawarkan bantuan dana usaha</p> <p>17. mengikuti pelatihan untuk klien</p>

	4. meningkatkan akses pada pelayanan klien dan fasilitas pelayanan publik	1. memberikan akses klien untuk mendapatkan pelayanan publik 2. memberikan kemudahan mendapatkan fasilitas kepada klien yang membutuhkan	18. Membantu untuk administrasi bpjs 19. Membantu untuk ke Puskesmas 20. Membantu mendapatkan bantuan dari lembaga sosial 21. Membantu mendapatkan kaki palsu 22. Membantu mendapatkan obat gratis 23. Membantu mendapatkan kursi roda untuk klien 24. membantu mendapatkan tongkat

Variabel: Kemandirian (Watson & Lindgren, 1973)	1. Kemampuan berinisiatif	1. mampu mengurus diri 2. mampu menolong diri 3. mampu bersosialisasi dan beradaptasi	25. Mampu melakukan aktivitas di rumah 26. Mampu melakukan aktivitas di luar rumah 27. Tantangan dunia kerja 28. Memiliki motivasi 29. Mampu memaksimalkan kemampuan diri 30. Mampu menggunakan peralatan 31. Interaksi dengan masyarakat 32. Mengikuti kegiatan di masyarakat
	2. Mengatasi hambatan atau masalah	1. Menciptakan usaha kecil 2. mengatasi masalah yang	33. mampu mengambil peluang usaha 34. Mampu mengatasi keterbatasan di transportasi umum

		dihadapi pada keterbatasan	35. Mampu mengatasi keterbatasan di rumah sakit 36. Mampu mengatasi keterbatasan di ruang publik
	3. Rasa Percaya diri	1. Berani mengambil keputusan 2. Tidak mudah berputus asa 3. Semangat menjalani kehidupan	37. Kesiapan diri ketika berada di ruang publik 38. Menghargai keputusan 39. Tidak mudah menyerah 40. Percaya diri dengan keadaan nya

Sumber: Literatur

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pendekatan kuantitatif. Cresweel (2010, hlm 24) menyatakan bahwa, “Pendekatan kuantitatif adalah pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan frekuensi dan prosentase tanggapan mereka”.

Penelitian ini menggunakan penelitian Quasi Eksperimental atau eksperimen semu desain *Non-equivalent Control Group Design*. Desain penelitian ini dilakukan nya dengan cara memberikan perlakuan kepada dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol sebagai pembandingnya. Desain ini dilandaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan objek nya yaitu masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang menjadi penyandang disabilitas fisik yang mana dalam melakukan pendampingan disabilitas oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kita belum pasti bahwa hasil pendampingan yang dilaksanakan akan mempengaruhi kemandirian dari disabilitas.

Tabel 1.2 Desain Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

O_1	X	O_2
O_3		O_4

Keterangan:

O_1 = Penyandang Disabilitas fisik sebelum diberikan bantuan pendampingan oleh pekerja sosial masyarakat

O_2 = Penyandang Disabilitas fisik setelah diberikan bantuan pendampingan oleh pekerja sosial masyarakat

O_3 = Penyandang Disabilitas fisik yang tidak diberikan pendampingan oleh pekerja sosial masyarakat

O_4 = Penyandang Disabilitas fisik yang tidak diberikan pendampingan oleh pekerja sosial masyarakat dalam jangka waktu tertentu

X = Pendampingan oleh Pekerja sosial Masyarakat (PSM)

Penelitian kuantitatif menghasilkan informasi yang lebih terukur. Penelitian kuantitatif tidak memperlumahkan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian, karena hasilnya lebih banyak bergantung dengan instrument yang digunakan dan terukur dengan variabel yang digunakan. Menurut Creswell (2010) dalam Pendekatan kuantitatif ini penelitian akan bersifat pre-determined, analisis data statistik serta interpretasi data statistik. Peneliti yang menggunakan Pendekatan kuantitatif akan menguji teori dengan merinci hipotesis yang sudah disusun secara spesifik, selanjutnya mengumpulkan data untuk mendukung atau membantah hipotesis-hipotesis itu.

Selain itu, penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012, hlm. 11) adalah sebagai berikut:

Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian krusial dalam penelitian kuantitatif. Hal ini memberikan gambaran atau jawaban akan hubungan yang fundamental dari hubungan kuantitatif

Dari yang sudah disampaikan diatas, Pendekatan kuantitatif adalah Pendekatan dalam penelitian untuk menguji hipotesis dengan menggunakan angka berupa statistik dengan mengumpulkan data berdasarkan instrument, analisis yang sifatnya kuantitatif untuk menguji suatu teori. Maka berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini menggunakan Pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh pelaksanaan pendampingan sosial oleh

pekerja sosial terhadap Kemandirian orang dengan penyandang disabilitas fisik di dinas sosial kota Bogor.

Sebelum melakukan penelitian harus ditentukan terlebih dahulu untuk pelaksanaannya, supaya bisa tergambar bagaimana arahan dan pedoman untuk melaksanakan penelitian. Menurut Cresweel (2010) “metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan terhadap berbagai permasalahan penelitian”. Metode penelitian bisa dijadikan pedoman bagi peneliti dan memudahkan peneliti dalam mengarahkan penelitiannya, sehingga tujuan dari penelitian bisa tercapai.

Jenis penelitian ini menggunakan metode survei untuk mengambil data dari populasi dan metode deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan serta membuat gambaran kesimpulan berbagai kondisi, situasi, realitas sosial dari fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelenggaraan pendampingan sosial terhadap penyandang disabilitas fisik. Peneliti memilih menggunakan metode deskriptif untuk melihat sebab-akibat antara variabel bebas (pendampingan sosial) dengan variabel terikat (Kemandirian).

West dalam (Darmawan, 2013, hal.38) menjelaskan bahwa:

Metode deskriptif merupakan metode penelitian berupa Pengumpulan data untuk mengetes hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Tujuan metode deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Metode bersifat deskriptif memiliki tujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, aktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta pengaruh antara teori yang diteliti. Metode deskriptif menurut Narimawati (2008:21) adalah metode

yang menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian melalui pengungkapan berupa narasi, grafik atau gambar metode yang mengungkapkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang actual. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif adalah sebuah metode yang dipakai peneliti untuk membuat deskripsi mengenai hasil berupa data angka yang sistemik, aktual dan akurat mengenai fakta yang terkait dengan pengaruh pelaksanaan pendampingan sosial terhadap Kemandirian Penyandang disabilitas fisik

1.7.2. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

1. Populasi

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian populasi serta ukuran sampel yang akan digunakan didalam penelitian ini. Dimana sampel tersebut yang kemudian akan menjadi responden atau sumber data bagi peneliti.

Menurut Sugiyono (2016:80) definisi populasi adalah sebagai berikut :

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Menurut Sugiyono (2011:86) berpendapat bahwa: “makin besar jumlah sampel yang mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi”. Pengambilan sampel dari penelitian harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga bisa didapatkan sampel yang benar representative yang benar benar-benar mewakili karakteristik dari populasi.

Populasi adalah keseluruhan objek dari penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-

peristiwa sebagai sumber daya yang memiliki karakteristik dalam penelitian (Margono, 2004) populasi dalam setiap penelitian harus dijelaskan secara gambalang. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah 30 Penyandang Disabilitas Fisik yang dilakukan

Pendampingan oleh Pekerja sosial Masyarakat (PSM) dan 25 Penyandang Disabilitas Fisik yang tidak dilakukan pendampingan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

1.3 Tabel Populasi Sampel Kelompok yang diambil

Populasi Sampel yang diambil	
30 populasi Penyandang Disabilitas Fisik yang pernah didampingi oleh Pekerja sosial masyarakat (PSM)	30 populasi Penyandang Disabilitas Fisik yang belum pernah didampingi oleh Pekerja sosial masyarakat (PSM)

Disini peneliti juga menentukan subyek yang sesuai dengan karakteristik sebagai berikut :

- A. Umur >17 tahun sampai <50 tahun
- B. Laki-laki dan perempuan
- C. Termasuk dalam penyandang disabilitas fisik

- D. Pernah diberikan pendampingan oleh PSM dan tidak pernah diberikan pendampingan oleh PSM
- E. Warga Kota Bogor

2. Sampel

Untuk memudahkan Pengumpulan data perlu dilakukan pengambilan sampel penelitian. Sampel diambil dengan cara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013: 124). Pertimbangan yang dimaksud adalah yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk menentukan sampel pengambilan data. Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau tujuan tertentu. Dalam (Soehartono, 2015) purposive sampling untuk jadi sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang menurut dia sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini adalah Penyandang Disabilitas Fisik.

3. Jenis Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya atau lapangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengisian angket oleh responden, yaitu Penyandang Disabilitas Fisik.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian seperti data penyandang disabilitas fisik dan tempat penelitian.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2013:224) teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Untuk mendukung kebutuhan analisis dalam penelitian ini, peneliti memerlukan sejumlah data. Adapun cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini, peneliti melakukan Pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Kuisioner adalah teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013). Dengan menggunakan teknik Pengumpulan data ini dinilai lebih efisien ketika digunakan untuk responden yang banyak dibandingkan wawancara. dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden dan responden pun memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk menggali data mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan kondisi mereka ketika dilakukan pendampingan oleh pekerja sosial masyarakat.

2. Wawancara adalah situasi sosial antar dua orang, dimana proses psikologis yang terlibat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan berbagai macam tanggapan sesuai tujuan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data subjek yang diwawancara, subjek nya ialah penyandang disabilitas yang dilakukan pendampingan dan tidak dilakukan pendampingan.
3. Observasi adalah teknik mengumpulkan data yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Menurut Sutisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam proses pelaksanaannya, terdapat dua perbedaan, yaitu observasi berperan serta dan observasi tidak berperan serta. Dalam penelitian ini, peneliti ikut langsung turun ke lapangan bersama pekerja sosial masyarakat (PSM) yaitu menggunakan cara *participant observation* (observasi berperan serta).

1.7.4. Alat Ukur Variabel

Pengukuran menurut Champion (1976) mengatakan bahwa pengukuran adalah penggunaan angka-angka pada ciri-ciri sosial dan psikologis nominal dari individu dan kelompok menurut aturan tertentu, dan menghubungkan angka-angka ini dengan ciri-ciri tadi secara simbolik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tingkatan pengukuran skala ordinal. Skala ini lebih tinggi tingkatannya dari skala nominal. Dalam (Hardani, 2020) skala ordinal digunakan untuk pemeringkatan dalam sebagai studi penelitian, dipakai untuk menentukan tingkat persepsi konsumen, prefensi, kepuasan. Alasan peneliti menggunakan skala ordinal, karena memiliki tingkatan dalam mengukur tingkat loyalitas, hubungan, kepuasan, motivasi, kualitas produk atau jasa. Keberhasilan, nilai tambah dan lainnya. Sejalan dengan tujuan dari penelitian ini menguji seberapa pengaruh pelaksanaan pendampingan yang dilakukan pekerja sosial masyarakat untuk Kemandirian penyandang disabilitas fisik.

Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016:93)

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item instrument yang berupa pertanyaan atau pernyataan, cara membuat kategori pada setiap item pernyataan atau pertanyaan yang diberi nilai sebagai berikut:

- a. Kategori jawaban sangat setuju diberi nilai 5
- b. Kategori jawaban setuju diberi nilai 4

- c. Kategori jawaban kurang setuju diberi nilai 3
- d. Kategori jawaban tidak setuju diberi nilai 2
- e. Kategori jawaban sangat tidak setuju diberi nilai 1

Tabel 1.2
Skala Model Likert

Pilihan Jawaban	Bobot Nilai	
	Pertanyaan Positif (+)	Pertanyaan Negatif (-)
Sangat setuju/selalu/sangat baik/...	5	1
Setuju/sering/baik/....	4	2
Ragu-ragu/kadang-kadang/Cukup baik/...	3	3
Tidak setuju/Jarang/kurang baik/...	2	4
Sangat tidak setuju/tidak pernah/tidak baik/....	1	5

Sumber: Sugiyono (2016:94)

1.7.6. Teknik analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah. Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang sudah didapatkan.

Menurut Sugiyono (2016:147) yang dimaksud teknik analisis data adalah:

“kegiatan setelah data dari seluruh responden atau data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk hipotesis yang telah diajukan”.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu diubah ke dalam angka yang dimasukkan ke dalam tabel. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh pelaksanaan pendampingan sosial dengan Kemandirian penyandang disabilitas fisik. Untuk melakukan analisis, maka digunakan uji dengan u-mann whitney, dengan rumus :

$$U_1 = n_1 x n_2 + \frac{(n_1 + 1)}{2} - \sum R_1$$

$$U_1 = n_1 x n_2 + \frac{(n_1 + 1)}{2} - \sum R_2$$

Keterangan:

U = Simbol statistic yang dipakai dalam tes U-Mann Whitney

n_1 = jumlah responden kelompok eksperimen

n_2 = jumlah responden kelompok kontrol

R_1 = jumlah rank kelompok eksperimen

R_2 = jumlah rank kelompok kontrol

Pengujian statistik ini berdasarkan pada karakteristik kelompok yaitu kelompok saling lepas dan keduanya memiliki skala ordinal, kemudian hasil perhitungan dari rumus U dimasukan Z_{hitung} dengan rumus:

$$Z_{hitung} = \frac{u_{skor} - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\left(\frac{n_1 x n_2}{N(N-1)}\right) \left(\frac{N^3 N}{12} \Sigma r\right)}}$$

Dimana : $N = n_1 + n_2$

$$T = \frac{t^2 - t}{12}$$

T = Banyaknya observasi yang berangka sama untuk semua ranking tertentu

Hasil perhitungan z_{hitung} dibandingkan dengan z_{tabel} dengan kriteria:

H_0 = ditolak, H_1 diterima jika $z_{hitung} < t_{tabel}$

1.7.7. Lokasi Usulan Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Dinas Sosial Kota Bogor. Peneliti memilih lokasi ini karena pertimbangan beberapa hal, yaitu:

1. Dinas Sosial Kota Bogor sebagai garda pertama pelayanan dalam penuntasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga mendorong peneliti untuk ingin menguji pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial pada lembaga dinas sosial.

2. Terdapat Pekerja sosial Masyarakat sebagai pendamping pada bagian bidang rehabilitas sosial di Dinas Sosial kota Bogor, sehingga memudahkan peneliti untuk ikut observasi bersama pekerja sosial masyarakat ketika di lapangan.
3. Tersedia nya data Penyandang Disabilitas yang diperlukan dan responden untuk dilakukan wawancara.
4. Akses lokasi yang terjangkau. Peneliti memilih lokasi ini karena akses untuk mencapai lokasi ini terjangkau dan dapat memudahkan peneliti untuk melakukan observasi di lapangan.

1.7.8. Jadwal Penelitian

No	Jadwal kegiatan	Waktu pelaksanaan 2021-2022						
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Tahap pra lapangan								
1	Penjajakan	■						
2	Studi literature	■						
3	Penyusunan proposal		■	■				
4	Seminar proposal		■	■				
5	Penyusunan pedoman wawancara				■			
Tahap pekerjaan lapangan								
6	Pengumpulan data					■	■	
7	Pengolahan dan analisis data					■	■	■
Tahap penyusunan laporan akhir								
8	Bimbingan penelitian	■	■	■	■	■	■	■
9	Pengesahan hasil penelitian akhir						■	■
10	Sidang laporan akhir						■	■

